

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable development* merupakan aspek yang sangat penting dan telah digunakan sebagai tolok ukur perkembangan dan pertumbuhan negara. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang didirikan pada tahun 1967, tepatnya tanggal 8 Agustus 1967 merupakan organisasi yang memiliki peran krusial bagi kemajuan dan pembangunan banyak negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dengan fokus utamanya yaitu dalam mempertahankan stabilitas, keamanan, serta kesejahteraan geopolitik dan ekonomi. Negara-negara ASEAN memiliki peran strategis dalam menciptakan lalu lintas perdagangan dan investasi yang efektif serta kompetitif, namun tetap mengutamakan perdamaian di antara negara-negara ASEAN.

Pertumbuhan ekonomi ASEAN tidak terlepas dari tingkat pendapatan yang diperoleh negara-negara di dalamnya. Pajak merupakan hal yang melekat pada pendapatan suatu negara, dimana pajak menjadi suatu kewajiban berkontribusi oleh pemerintah dengan tidak adanya perjanjian pengembalian ke warga negara. Negara-negara ASEAN memiliki kesamaan sumber pendapatan. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN menunjukkan bahwa sektor pajak menjadi penyumbang terbesar yaitu 74% dari total pendapatan negara (Bappenas, 2020). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai primadona dan hal yang krusial bagi negara-negara ASEAN. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam berkontribusi. Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN menunjukkan jika Wajib Pajak Badan menjadi kontributor terbesar karena pengenaan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tarif pajak sangat mempengaruhi keputusan pajak bagi perusahaan dengan kapitalisasi yang tinggi, terutama perusahaan multinasional. Multinasional suatu perusahaan dapat diakui ketika berhasil melakukan ekspansi yang luas dan beroperasi dengan afiliasi bisnis di banyak negara. Beberapa negara ASEAN menjadi pilihan perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi ekspansi dan pembangunan afiliasi-afiliasi bisnis karena dianggap berpotensi tinggi bagi kemajuan perusahaan.

Tabel 1.1
Tarif Pajak Penghasilan Badan Negara-Negara ASEAN Tahun 2021

No.	Nama Negara	% Tarif Pajak Penghasilan Badan (TPPB)
1.	Singapura	17
2.	Brunei	18.5
3.	Kamboja	20
4.	Thailand	20
5.	Vietnam	20
6.	Laos	20
7.	Indonesia	22
8.	Malaysia	24
9.	Myanmar	25
10.	Filipina	30
Rata-Rata		21.65

Sumber: Trading Economics (2021)

Perbedaan tarif dan regulasi membuat pajak menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan multinasional dalam memberikan keputusan pajak. Perusahaan multinasional melihat perbedaan tarif sebagai kesempatan untuk meminimalisir tarif pajak, namun tidak bisa disimpulkan jika tarif pajak menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan perusahaan multinasional ketika akan memperluas afiliasi bisnis di negara asing. Perusahaan multinasional juga mempertimbangkan potensi suatu negara dengan arus investasi yang baik.

Tabel 1.2
Besar Arus Masuk *Foreign Direct Investment* Negara-Negara ASEAN Tahun 2019 dan 2020

Peringkat per Tahun 2019	Negara	Nilai dalam Juta US\$		Persentase dari Total ASEAN (%)	
		2019	2020	2019	2020
1.	Singapura	92.081	90.562	59,10	66,62
2.	Indonesia	23.249	18.581	15,04	13,67
3.	Vietnam	16.120	15.800	10,35	11,62
4.	Malaysia	7.650	3.483	4,91	2,56
5.	Filipina	4.996	6.542	3,20	4,81
6.	Thailand	4.146	-6.100	2,66	-4,49
7.	Kamboja	3.706	3.625	2,38	2,67
8.	Myanmar	2.766	1.834	1,77	1,35
9.	Laos	557	968	0,36	0,71
10.	Brunei	275	577	0,18	0,42
11.	Timor Leste	75	72	0,05	0,05
Total Nilai Arus Masuk FDI Negara ASEAN		155.801	135.944	100	
Rata-Rata Nilai Arus Masuk FDI Negara ASEAN		14.164	12.358		
Total Nilai Arus Masuk FDI Dunia		1.539.880	998.891		

Sumber: UNCTAD (2020 - 2021)

Dari tabel 1.2 menyebutkan bahwa peringkat Singapura, Indonesia, dan Vietnam merupakan 3 negara teratas dengan persentase arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) tertinggi. Vietnam memiliki tarif pajak yang sama dengan beberapa negara ASEAN lainnya dan Indonesia termasuk negara yang memiliki tarif pajak tinggi, namun persentase arus masuk FDI yang dihasilkan memiliki rentang yang jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Faktor tingginya persentase arus masuk FDI bisa jadi dipengaruhi oleh potensi investasi yang baik di negara tersebut, sehingga arus masuk FDI menjadi faktor yang dipilih oleh

peneliti dalam menentukan sampel penelitian. Dengan asumsi bahwa perusahaan multinasional dapat berinvestasi di negara yang memiliki sumber pendapatan tinggi sehingga memberikan peluang besar kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menggeser pendapatan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Istilah pergeseran pendapatan atau *income shifting* merupakan *fraud* yang dilakukan perusahaan melalui manipulasi harga transfer barang dan jasa dengan menyerahkan pendapatan yang lebih banyak ke negara dengan pajak lebih rendah (Richardson dan Taylor, 2015).

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran atau pembebanan pajak dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, namun tetap dilakukan secara legal (Rahmadani, dkk. 2020). Penghindaran pajak dianggap tidak etis dan memiliki sanksi yang berat. Perbuatan ini juga merugikan sejumlah pihak khususnya masyarakat maupun pemerintah yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak. Penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan pergeseran pendapatan melalui berbagai instrumen, instrumen yang sering digunakan dalam penghindaran pajak yaitu seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible asset*, dan kompensasi manajemen. Negara dengan tarif pajak tinggi merasa dirugikan dengan adanya afiliasi yang beroperasi di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah karena beresiko mengurangi pendapatan negara (Nugraha dan Kristanto, 2019). Hal tersebut menjadi tantangan bagi regulator dan pemerintah untuk tetap konsisten dalam memaksimalkan penghasilan dari sektor pajak.

Pramesthi, dkk. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional juga melibatkan beban bunga dan utang sebagai skema penghindaran pajak. Pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* menjadi variabel yang dipilih oleh peneliti karena perusahaan multinasional memanfaatkan tingginya *leverage* sebagai upaya mengurangi pajak yang tinggi. Sedangkan *intangible asset* dipilih sebagai proksi kedua setelah *thin capitalization* dikarenakan banyak perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internal dengan perusahaan afiliasi seakan-

akan menimbulkan pengeluaran biaya demi menurunkan pembebanan pajak. Starbucks Inggris pernah melakukan taktik *offshore licencing* dimana mereka mengaku bahwa Starbucks Inggris tidak memiliki kekayaan intelektual atas logo, desain, dan lisensi resep, sehingga mereka perlu membayar biaya lisensi yang cukup besar (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional tidak lepas dari andil Eksekutif perusahaan, terutama Direksi dan Komisaris. Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk keagenan, yaitu hubungan antara pemilik, kreditor, serta pemerintah dengan manajemen perusahaan, dimana pemegang saham, kreditor, dan pemerintah dianggap sebagai *principal* (pemilik sumber daya ekonomi). Alasan motivasi Eksekutif dan pemegang saham mayoritas melakukan penghindaran pajak yaitu karena koneksi politik dianggap mampu meminimalisir sanksi dengan perlindungan aturan negara, meringankan kesulitan keuangan, serta memudahkan perusahaan dalam mengakses informasi di lokasi afiliasi perusahaan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel independen tarif pajak dan pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset*. Variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN (Singapura, Indonesia, dan Vietnam), koneksi politik menjadi variabel pemoderasi dari variabel yang diambil, serta besar dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol penelitian.

Pendekatan kuantitatif yang digunakan menggunakan sampel perusahaan multinasional yang ter-*listing* di tiga bursa negara dengan tingkat FDI teratas di ASEAN yaitu Singapore Exchange (SGX) (Singapura), Bursa Efek Indonesia (IDX) (Indonesia), dan 2 bursa negara Vietnam yaitu Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) dan Hanoi Stock Exchange (HNX) pada tahun 2017-2020. Peneliti memilih periode 2017-2020 karena tingkat arus masuk FDI di Singapura, Indonesia, dan Vietnam menunjukkan pola yang sama dan cenderung naik secara konsisten, dimana tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, namun mengalami kenaikan ditahun 2019, sedangkan di tahun 2020 cenderung mengalami penurunan karena lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19 (UNCTAD, 2020). Perusahaan

multinasional yang terdaftar di ASEAN dipilih karena memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi, sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak dan melindungi kekayaan perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis ke berbagai negara ASEAN.

1. 2. Kesenjangan Penelitian

Penelitian oleh Bernardo, dkk. (2020) menyebutkan jika pergeseran pendapatan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan multinasional karena laba pelaporan laba perusahaan sudah selaras dengan aktivitas ekonomi. Sementara penelitian Pramesthi, dkk. (2019) membuktikan jika pergeseran pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Pramesthi, dkk. (2019) menyebutkan jika *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Nugraha dan Kristanto (2019) menyebutkan jika aktivitas *intangible asset* yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Richardson dan Taylor (2014), membuktikan bahwa *thin capitalization* dan *intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Pohan (2009) dan Oktavianie (2019) menyebutkan jika tarif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Purwanti (2014) menyebutkan jika tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Rahmadani, dkk. (2020) menyebutkan jika koneksi politik yang dimiliki Direksi dan Komisaris tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Sedangkan koneksi politik signifikan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) membuktikan jika koneksi politik yang dimiliki oleh Eksekutif dan pemegang saham mayoritas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan variabel manajemen laba riil. Perusahaan menggunakan kesempatan

ini untuk menurunkan beban pajak dengan cara *lobbying* maupun mengambil celah dari longgarnya pengawasan hukum.

1. 3. Tujuan Penelitian

Latar belakang yang sebelumnya dijabarkan telah menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN.
3. Memperoleh bukti empiris tentang koneksi politik dapat memoderasi pengaruh pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN.

1. 4. Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan multinasional yang berlokasi di 3 negara dengan arus masuk FDI tertinggi di ASEAN dan terdaftar di bursa negara yaitu Singapore Exchange (SGX) (Singapura), Bursa Efek Indonesia (IDX) (Indonesia), dan 2 bursa negara Vietnam yaitu Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) dan Hanoi Stock Exchange (HNX) pada tahun 2017-2020. Penelitian ini memiliki variabel independen (bebas) yaitu pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset*, serta tarif pajak. *Thin capitalization* diukur menggunakan DER (*debt to equity ratio*) perusahaan, sedangkan *intangible asset* diukur menggunakan total *intangible asset* dibagi total aset (*total asset*) perusahaan. Tarif pajak diukur menggunakan tarif pajak masing-masing negara pada tahun 2017-2020. Variabel dependen (terikat) dari penelitian ini adalah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang diukur menggunakan *Current ETR*. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan umur dan besar

perusahaan multinasional, dengan *political connection* atau koneksi politik sebagai variabel moderasi.

1. 5. Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* serta tarif pajak terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan menggunakan umur dan besar perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN
3. Koneksi politik memperkuat pergeseran pendapatan dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di ASEAN

1. 6. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas antara lain:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini menghasilkan bukti empiris yaitu jika pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* merupakan bagian dari skema penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional di ASEAN. Serta bukti bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh eksekutif dan pemegang saham mayoritas sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi keputusan pajak perusahaan multinasional

2. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki manfaat dan dapat dijadikan informasi maupun pertimbangan kepada pembuat regulator di negara-negara ASEAN untuk berantisipasi dan lebih *detail* terhadap aktivitas pajak, karena perusahaan multinasional memiliki kesempatan yang besar dalam penghindaran pajak, khususnya negara Singapura, Indonesia, dan Vietnam yang dipilih karena memiliki persentase arus masuk FDI yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

1. 7. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang telah ditulis peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah sehingga menghasilkan tujuan yang bermanfaat sebagai tambahan literatur dan teori mengenai topik perpajakan. Bab ini juga menjabarkan mengenai kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang ditulis oleh peneliti menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi rujukan serta referensi penulis dalam melakukan penelitian dengan menghubungkan keterkaitan antara beberapa variabel penelitian. Variabel penelitian yang dibahas adalah pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset*, tarif pajak, serta koneksi politik sebagai variabel pemoderasi, dengan umur dan besar perusahaan sebagai variabel kontrol. Dalam bab ini juga menjelaskan hipotesis sebagai jawaban sementara yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel dependen dan independen yang telah dijabarkan sebelumnya akan diidentifikasi dengan indikator pengukuran masing-masing variabel. Pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* serta tarif pajak sebagai variabel independen, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sebagai variabel dependen, koneksi politik sebagai variabel moderasi, serta umur dan besar perusahaan multinasional sebagai variabel kontrol penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan asal atau sumber data, populasi, sampel, periode penelitian, model empiris penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik data yang akan digunakan.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Pembahasan yang ditulis peneliti menjelaskan hasil pengolahan data dari variabel-variabel yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu pergeseran pendapatan dengan proksi *thin capitalization* dan *intangible asset* serta tarif pajak sebagai variabel independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta koneksi politik sebagai variabel moderasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan MRA (*Moderated Regression Analysis*).

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran penelitian ditulis berdasarkan hasil yang diperoleh dari bab sebelumnya. Peneliti menjelaskan ringkasan hasil, simpulan, saran untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.